



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI CHANDRAWALI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN URT**
3. NHK : **833803**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/180 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN Rp. 340.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/1.987 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **333.500.000**

1. KAPAL LAUT/PERAHU, HONDA PERAHU TEMPEL Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. MOBIL, TOYOTA CALYA 1.2 G Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
5. MOTOR, YAMAHA BSD A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
6. MOTOR, YAMAHA B3F-1A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
7. MOTOR, YAMAHA B3F-1A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.



23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 120.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 93.406.818

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.246.906.818

III. HUTANG

Rp. 87.800.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.159.106.818

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.